



MEDIA SOSIAL:

PERAN DAN KIPRAH DALAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

SOCIAL MEDIA:

ROLE AND GAIT IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL INSIGHTS

SUSILO ADI PURWANTORO¹, RIYADI SYAHARDANI², ERWIN HERMAWAN³, AANG KUVAENI⁴, INDARTI⁵

¹Falkutas Teknologi Pertahanan Unhan RI, 081287077031

²Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, 08159121985

³Program Studi Teknik Informatika-Universitas Ibn Khaldun, rwien.gfm@gmail.com 081314094946

⁴Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya, 081321621370

⁵Direktorat Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi, Lemhannas RI, 081319807677

ABSTRAK. Media sosial, merupakan salah satu dari sekian banyak perangkat informasi strategis yang bilamana tidak dapat dikendalikan serta menjadi unproduktif maka akan membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian mendalam terkait bagaimana merumuskan platform Media Sosial Nasional yang memiliki kemampuan untuk menarik perhatian publik sekaligus menyampaikan konten-konten pembangunan karakter kebangsaan yang berlandaskan pada 4 (empat) konsensus bangsa yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan sesanti bhineka tunggal ika. Kajian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan mengapa fenomena itu terjadi dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan desain kajian menggunakan desain kajian kasus dan kajian lapangan. Hasil kajian menunjukkan, dalam rangka mengantisipasi dampak negatif media sosial perlu dikembangkan implementasi konsep nilai-nilai Wawasan Kebangsaan. Salah satu upaya strategis adalah dengan mengoptimalkan peran media sosial yang saat ini sedang digandrungi lintas generasi. Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan dapat diinformasikan secara luas kepada masyarakat sehingga dapat mendorong masyarakat untuk mengantisipasi nilai-nilai yang merugikan bangsa dan mengadopsi sikap mental yang mendukung terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Peningkatan peran media sosial perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan merupakan prioritas pembangunan nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama segenap komponen bangsa dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan ketahanan nasional.

Kata kunci: Media sosial , karakter kebangsaan, wawasan kebangsaan , ketahanan nasional

ABSTRACT. *Social media is one of the many strategic information tools which if it cannot be controlled and becomes unproductive, it will endanger the survival of the nation and state. Therefore, an in-depth study is needed regarding how to formulate a National Social Media platform that has the ability to attract public attention as well as deliver national character-building content based on 4 (four) national consensus, namely Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Unitary State of the Republic of Indonesia and the Unity in Diversity. This study uses a descriptive analytical method to describe why this phenomenon occurs with a qualitative approach. Meanwhile, the study design used a case study design and a field study. The results of the study show, in order to anticipate the negative impact of social media, it is necessary to develop the implementation of the concept of National Insight values. One of the strategic efforts is to optimize the role of social media which is currently being loved across generations. The values of the National Insight can be widely informed to the public so that it can encourage the community to anticipate values that are detrimental to the nation and adopt a mental attitude that supports the realization of national unity and integrity. Increasing the role of social media needs attention from the government and is a national development priority that must be carried out by the government together with all components of the nation in order to increase national insight to realize national resilience.*



Keywords: Social media, national character, national insight, national resilience

PENDAHULUAN

Berbagai pengaruh dan dampak negatif dari perkembangan lingkungan strategis yang disertai berubahnya persepsi dan hakikat ancaman terhadap eksistensi maupun kedaulatan bangsa, tentu saja harus dicermati dan disikapi oleh bangsa Indonesia secara sungguh–sungguh. Hal ini penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technologies–ICT*) telah berimplikasi semakin berkembangnya peperangan modern dalam bentuk *Asymmetric Warfare* dan *Proxy War*.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang harus menjadi fokus perhatian segenap komponen bangsa adalah kemandirian dalam penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi di berbagai bidang, termasuk teknologi informasi. Teknologi informasi salah satunya terkait maraknya penggunaan media sosial (Medsos) di kalangan masyarakat.

Media sosial, merupakan salah satu dari sekian banyak perangkat informasi strategis yang bilamana tidak dapat dikendalikan serta menjadi unproduktif maka akan membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Medsos sering kali digunakan oleh para pengguna (netizen) untuk hal-hal positif seperti berita-berita

aktual dan terkini, media informasi, media hiburan dan lain sebagainya. Namun demikian tidak dipungkiri banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan untuk memproduksi dan mendiseminari/menyebarkan berita Hoax tanpa bukti kebenarannya.

Media sosial juga berfungsi sebagai platform di era disrupsi digital. Proses ini sekarang difasilitasi melalui API (*Application Programming Interface*). Pemilik atau pelaku usaha *e-commerce* bisa memanfaatkan media sosial yang ada sebagai strategi pemasaran. Bahkan saat ini, media sosial menjadi cara yang paling ampuh dalam hal mempromosikan produk yang ada.

Optimalisasi pemanfaatan media sosial ini terbukti telah menggantikan transaksi pasar secara tradisional. Fungsi pasar telah beralih dari pasar konvensional ke pasar digital. Dengan demikian seluruh pelaku ekonomi mau tidak mau suka dan tidak suka harus menerima perubahan era digitalisasi ini. Hal demikian tidak hanya terjadi pada sektor ekonomi saja, digitalisasi komunikasi dalam bentuk Medsos mampu merubah sistem dan budaya komunikasi, koordinasi dan interaksi bahkan dalam dunia pendidikan dan kesehatan. Media sosial mampu menjadi sarana komunikasi dan interaksi antara individu satu dengan lainnya, antar kelompok maupun antara individu dengan kelompok.



Berkaca dari pengalaman lepasnya Sipadan dan Ligitan, kehadiran pemerintah dalam bentuk infrastruktur pembangunan maupun unsur pemerintahan di garis depan sangat diperlukan. Pemerintah dalam hal ini Kemkominfo RI telah membangun berbagai infrastruktur bangsa. Peran media sosial sebagai jembatan informasi yang valid tanpa unsur *hoax* (kebohongan publik) sangat diperlukan dan dioptimalkan.

Oleh karena itu diperlukan suatu kajian mendalam terkait bagaimana merumuskan platform Media Sosial Nasional yang memiliki kemampuan untuk menarik perhatian publik sekaligus menyampaikan konten-konten pembangunan karakter kebangsaan yang berlandaskan pada 4 (empat) konsensus bangsa yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan sesanti bhineka tunggal ika serta materi lain seperti kewaspadaan nasional, ketahanan nasional, wawasan nusantara, sistem manajemen nasional, kepemimpinan dan lainnya sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Diskusi kajian ini dilaksanakan dengan melibatkan para pengambil kebijakan, akademisi, praktisi serta pemangku kepentingan lain terhadap pembangunan wawasan kebangsaan di seluruh Wilayah NKRI dalam rangka memperkokoh Ketahanan Nasional.

METODE

Kajian ini menggunakan metode deskriptif

analitis untuk menggambarkan mengapa fenomena itu terjadi dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan desain kajian menggunakan desain kajian kasus dan kajian lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder serta pendapat para ahli yang diperoleh dari Focus Group Discussion (FGD) Diskusi Kelompok Terarah yang dilaksanakan di Jakarta untuk memperoleh data dan informasi dari para pakar tingkat pusat, dan juga dilaksanakan di daerah (DI Yogyakarta) untuk memperoleh data dan informasi dari para pakar tingkat daerah. Selanjutnya untuk melengkapi data dan informasi dilaksanakan Round Table Discussion (RTD) Diskusi Meja Bundar. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap berbagai data yang masuk.

Pada sisi lain, Pendekatan yang digunakan dalam melakukan kajian tentang optimalisasi peran media social guna mengembangkan wawasan kebangsaan adalah paradigma nasional dengan analisis multidisiplin dan interdisipliner sesuai dengan landasan teori yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi kondisi eksisting sistem pembinaan wawasan kebangsaan di Indonesia saat ini

Menurunnya wawasan kebangsaan antara lain ditandai dengan lemahnya penegakan hukum dan perlindungan HAM, merajarelaya korupsi, kesenjangan antara pusat dan daerah,



berkembangnya individualisme, masih adanya gerakan separatisme, terorisme, konflik horizontal di beberapa daerah, menurunnya toleransi, semangat kegotong-royongan, musyawarah dan mufakat, serta kuatnya ego sektoral dalam birokrasi pemerintahan menjadi pekerjaan rumah pemerintah saat ini.

Kadar wawasan kebangsaan dapat ditakar melalui meningkatnya isu demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup. Wawasan kebangsaan seharusnya menjadi benteng untuk menghadapi globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transportasi dengan segala dampaknya. Fenomena menurunnya wawasan kebangsaan perlu segera diatasi secara komprehensif dan mendasar untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangga menjadi bangsa Indonesia dalam rangka memperkuat ketahanan nasional. Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan kajian secara mendalam guna memantapkan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam rangka memperkokoh NKRI.

Kesulitan pemerintah dalam penyusunan regulasi pada kondisi perubahan lingkungan bisnis yang sangat dinamis dan berbagai kepentingan stakeholder sangat mempengaruhi industri media nasional. Kondisi internal industry media pada kualitas kompetensi individu jurnalis harus ditingkatkan dan terdaftar pada organisasi pers yang diakui oleh Dewan Pers sehingga dapat

dikontrol. Kebutuhan profit pada rutinitas produksi, industri media juga harus menyadari perannya dalam menghadapi media warfare.

Menurut *Miniwatts Marketing Group* yang ditampilkan dalam *Internet World Stat*, Indonesia berada pada peringkat 5 dari 20 negara pengguna internet teratas di dunia. Pada tingkat Asia, *Miniwatts Marketing Group* menampilkan Indonesia peringkat dari 10 negara pengguna internet teratas di Asia.

Berita hoaxes sering terdengar di kalangan masyarakat merupakan istilah untuk menyebut bahwa informasi tersebut tidak jelas kebenaran berita serta pemberi informasi. Rambu-rambu telah dibuat melalui UU ITE. Dalam media sosial terdapat informasi yang diragukan validitasnya dan masyarakat mudah percaya tanpa mencari informasi yang dapat lebih dipercaya kebenarannya dan terlambat sampai di masyarakat.

Disamping itu jika masalah wawasan kebangsaan yang terjadi pada era sekarang, dibiarkan tanpa disertai usaha untuk memperkokoh kembali wawasan kebangsaan maka bangsa Indonesia akan kehilangan jati diri bangsa dan eksistensi pada tataran dunia internasional serta tidak akan terwujudnya hidup damai secara berdampingan di kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini diperlukan penguasaan wawasan kebangsaan dari seluruh masyarakat Indonesia guna terwujudnya



masyarakat yang memahami masalah-masalah global, mempunyai keterampilan untuk mengatasi konflik secara konstruktif, mengenal dan hidup dengan standar internasional tentang kesetaraan hak-hak manusia dan ras, menghargai keragaman budaya dan menghargai kesatuan dunia (Barida, 2017). Oleh karena itu, berkaitan dan kemelekan warga negara ini pada akhirnya menunjukkan pemahaman warga negara dalam proses politik dan pemerintahan, lokal dan nasional yang mengerti hak dan kewajibannya dan selalu berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat lokal, nasional dan internasional (*Partnership for 21st Century Skills*, 2014; *Salpeter*, 2008).

Dewasa ini untuk memperkokoh wawasan kebangsaan bagi generasi muda masih terpusat pada pendidikan formal melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Namun, apabila dikaji lebih dalam dan komprehensif untuk memperkokoh wawasan kebangsaan tidak cukup melalui pendidikan formal saja, melainkan harus ditunjang melalui pendidikan informal seperti melalui komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu untuk mengembangkan identitasnya dan keterikatan pada komunitas global (*Banks*, 2008).

Dengan demikian prospek pendidikan kewarganegaraan berperan membangun generasi muda menjadi warga negara yang baik dan cerdas.

Komunitas dapat dimaknai sebagai sebuah kelompok gerakan sosial yang terdiri dari beberapa individu dengan dasar ada kesamaan tempat tinggal, kesamaan interest atau values, kesamaan pemikiran untuk mencapai tujuan tertentu. Gerakan sosial yang dilakukan oleh komunitas melalui tindakan kolektif menjadikan adanya tatanan tradisi baru. Selain itu rasa keanggotaan atas kolektifitas yang ada menimbulkan rasa memiliki diantara anggota komunitas (Blackshaw, 2010).

Berkaitan dengan komunitas, di kota-kota besar di Indonesia sebagai kota pintar (*smart city*) dan kota kreatif memiliki nuansa yang kaya akan komunitas, termasuk yang bergerak di bidang literasi di dalamnya. Literasi merupakan sarana penting komunikasi yang memungkinkan individu, masyarakat dan lembaga untuk berinteraksi, dari waktu ke waktu dan di seluruh ruang, karena mereka mengembangkan jaringan hubungan sosial melalui bahasa (Benavot, 2015).

Dalam konteks politik, ketika literasi disandingkan dengan civic menjadi civic literacy merupakan keniscayaan seiring dengan perubahan politik yang menuntut warga bertindak otonom (Suryadi, 2010, hal. 3). Tumbuh kembangnya pelbagai komunitas bidang literasi yang berada di kawasan Indonesia merupakan upaya untuk menggelorakan kembali budaya literasi di kalangan generasi muda. Keberadaan komunitas-komunitas tersebut dalam kajian



pendidikan kewarganegaraan dikenal dengan konsep “situs kewarganegaraan”, dan ada pula yang mengatakan bahwa keberadaan komunitas di masyarakat sebagai bagian dari civic community.

Zuriah dalam Wellyana (2019), pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem pendidikan nasional yang berperan sebagai pembentuk karakter bangsa. Untuk membentuk warga negara yang berperan aktif dalam pemerintahan, diperlukan strategi untuk meningkatkan kreativitas warga negara dalam hidup berbangsa dan bernegara melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Penanaman, pengembangan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan seharusnya dimulai sejak dini melalui pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat sebagai long life education untuk menumbuhkembangkan rasa, jiwa dan semangat kebangsaan, yang terwujud dalam bentuk pemikiran, sikap dan tindakan Hal ini utk bangun “national incooperation” di semua aspek kehidupan (IPOLEKSOSBUDHANKAM), sehingga bangsa dan negara ini akan selalu bersatu, tegak berdiri dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Menurut Gunawan (2021), kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mengembangkan wawasan kebangsaan antara lain; 1) Akibat pola konsumsi informasi digital yang melimpah berakibat pada kecanduan pada

sebagian besar anak muda; 2) Membuka peluang siapa saja bisa menjadi produsen informasi; 3) Aksesibilitas terhadap informasi masih belum merata bergantung pada kemampuan daya beli pulsa/kuota internet; 4) Kecenderungan menampilkan anonimitas atau dengan lambang atau sosok profile lain seperti avatar dan lain-lain; 5) Demokrasi yang rentan akan berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, radikalisme, ekstremisme, terorisme, residu kontestasi electoral dan lain-lain. Akibat pola konsumsi informasi digital yang melimpah berakibat pada kecanduan pada sebagian besar anak muda; 6) Aksesibilitas terhadap informasi masih belum merata bergantung pada kemampuan daya beli pulsa/kuota internet, dan 7) Kecenderungan menampilkan anonimitas atau dengan lambing atau sosok profile lain seperti avatar dan lain-lain. Sedangkan peluang pada saat ini karena bermunculan saluran baru paling potensial dengan karakteristik tanpa batas (borderless), intraktif dan multimedia, *New public sphere* media demokratis, freedom of expression dan ceruk komunikasi besar tapi “*niche market*”.

Oleh karena itu dalam rangka mengantisipasi dampak negatif media sosial perlu dikembangkan implementasi konsep nilai-nilai Wawasan Kebangsaan. Salah satu upaya strategis adalah dengan mengoptimalkan peran media sosial yang saat ini sedang digandrungi lintas generasi. Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan dapat



diinformasikan secara luas kepada masyarakat sehingga dapat mendorong masyarakat untuk mengantisipasi nilai-nilai yang merugikan bangsa dan mengadopsi sikap mental yang mendukung terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Analisis peluang dan tantangan optimalisasi pemanfaatan peran Media Sosial dalam mengembangkan wawasan kebangsaan di Indonesia

Revolusi industri generasi ke-empat 4.0 adalah tren di dunia industri saat ini yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber, salah satu hal terbesar di dalam Revolusi Industri kali ini adalah Internet of Things. Revolusi ini juga dikenal dengan istilah Smart Factory, dimana dilakukan penerapan konsep otomatisasi oleh mesin tanpa memerlukan lagi tenaga manusia dalam pengaplikasiannya. Inovasi baru *Internet of Things* (IoT), Big Data, percetakan 3D, *Artificial Intelligence* (AI), kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetika, robot dan mesin pintar diyakini akan merubah total dunia industri, jauh lebih canggih dari revolusi industri 3.0. Contoh di Indonesia adalah munculnya transportasi dengan sistem ride-sharing seperti Go-Jek dan Grab serta usaha baru yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Sebagian besar dari 270 juta penduduk Indonesia telah beradaptasi dengan lingkungan yang didominasi oleh teknologi, terutama

teknologi digital produk Revolusi i4.0 dimana energi yang melimpah, masyarakat sudah tidak buta teknologi, masyarakat terutama pemuda sudah memiliki kemampuan akseeleerasi dalam belajar, memiliki akses luas akan kemutakhiran dan kemampuan mengikuti kecepatan perkembangan teknologi (Efendi, 2021).

Sejak penemuan internet dan komputer yang disebut dengan ICT yang massif berdampak pada perkembangan wajah media sosial yang ada pada era lingkungan digital dengan fungsi yang sama dari mulai instrumen pemasaran (Marketing) bagi individu, organisasi swasta maupun Pemerintah yang memuat tentang retorika dituangkan dalam tulisan, gambar, suara maupun film. Dalam perjalanannya sejak dahulu dampak media sosial dapat berimplikasi pada hal positif dan konstruktif bagi kepentingan umum, individu maupun kelompok tetapi disisi lain media sosial dapat menjadi bagian daripada gerakan sosial (Social Movement) sampai dengan revolusi sosial (Social Revolution).

Media sosial sebagai *window on event and experience*, media social dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak “melihat “ apa yang terjadi diluar sana. Atau media juga dapat berperan sebagai media pembelajaran untuk mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Media sebagai *a mirror of event in society and the world, implying a faithful reflection*.



Cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya. Karenanya para pengelola media sering merasa tidak “bersalah”, jika isi media menggambarkan hal yang buruk dan mungkin menakutkan masyarakat. Implikasinya generasi muda semakin sibuk dengan dirinya sendiri (individualis), tidak peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya. Akibat kurangnya pengawasan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat terhadap penggunaan media sosial dapat menyebabkan generasi muda.

Melihat media social sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai bentuk informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga terjadi tanggapan dan umpan balik yang positif dan mungkin solutif terhadap beragam masalah yang ada. Hal ini diatur dengan regulasi yang berlaku saat ini Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Regulasi memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Pemerintah berkewajiban melakukan pencegahan penyebaran informasi elektronik yang dilarang dan pemerintah diberikan kewenangan melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Saat ini memang media sosial memegang peranan penting dalam peta perkembangan

informasi masyarakat. Perkembangan informasi tersebut mencakup pendidikan, ekonomi, budaya, bahkan hingga dakwah. Maka menjadi wajar jika saat ini Indonesia menemukan lowongan pekerjaan, promosi produk, peluang usaha, berita politik, artikel akademik hingga ceramah agama di sosial media. Setidaknya hal-hal tersebut dapat Indonesia temukan pada layanan sosial media mainstream seperti Path, Instagram, Line, Twitter, Whatsapp, dan Facebook. Disamping itu pemerintah Bersama rakyat harus dapat menangkap perkembangan dan perubahan karakter bangsa. Saat ini, kemampuan deteksi dini dan cegah tangkal pun harus dimiliki masyarakat, terutama generasi muda Indonesia yang populer disebut generasi milenial, dalam menghadapi budaya asing yang berlawanan dengan Pancasila (Gunadi, 2021).

Melalui data APJII dapat dilihat bahwa pengguna internet di Indonesia didominasi oleh masyarakat berusia 19–34 tahun dan 35–54 tahun. Berangkat dari sini dapat disimpulkan bahwa meski media sosial sudah menjangkau hampir semua lapisan usia, kelompok pengguna media sosial yang paling besar adalah mereka yang akrab dengan sebutan generasi milenial. Namun sangat disayangkan, kemampuan generasi muda yang begitu maju dalam mengikuti kemajuan teknologi, tidak diimbangi dan disertai dengan pengetahuan yang mumpuni terkait nilai-nilai wawasan kebangsaan terutama



Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI (Gunadi, 2021).

Sebuah fakta bahwa mayoritas masyarakat Indonesia saat ini berasal dari generasi milenial. Milenial adalah generasi yang lahir pada tahun 1980-2000 dan tumbuh bersama dengan TV berwarna, jaringan internet dan kemudahan lain akibat dari berkembangnya teknologi, Ciri-ciri Generasi Milenial antara lain banyak dipengaruhi oleh teknologi dan internet; optimis, percaya bahwa mereka special; yakin dengan cita-citanya; lebih toleran, berpikiran terbuka dan mudah mengutarakan pendapat; Cenderung menjadi kutu loncat; Lebih terfokus pada materi dan ketenaran; mudah merasa bosan pada barang yang dibeli; “No Gadget, no life”; Hobi melakukan pembayaran non cash; Suka dengan yang serba cepat dan instan; Memilih pengalaman dari pada asset; Berbeda perilaku dalam grup satu daripada yang lain; Jago multitasking; Kritis terhadap fenomena social; sedikit-sedikit posting; dan bagi millennial “sharing is cool”(Isnu, 2021).

Menurut Bintang (2021), berbicara mengenai media sosial, maka akan ditemukan pengaruh positif dan negatif dari media sosial. Arus informasi media sosial yang sangat deras tersebut, memiliki resiko terjadinya misinformasi yang tidak dapat dielakkan Pengaruh tergolong baik antara lain memudahkan Indonesia untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah,

penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat dan menyediakan ruang untuk berpesan positif. Sedangkan pengaruh buruk seperti menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet dan rentan terhadap pengaruh buruk orang lain dan berita-berita hoax atau berita bohong. Hal ini diperkuat oleh pendapat Efendi (2021) banyak praktek warganet Indonesia di media sosial yang kurang produktif bahkan menyebarkan konten-konten seperti hoax, pornografi, serangan siber. Hal ini akan menggiring kepada perilaku intoleransi, terorisme, radikalisme, penyalahgunaan narkoba, dan separatisme.

Dalam konteks kehidupan sosial dan politik Indonesia, media sosial bahkan telah mewujud sebagai laga peperangan, echo chamber. Secara historis, hal ini tidak terlepas dari proses pemilihan umum yang memunculkan kelompok-kelompok “anti-pemerintah”. Walaupun komponen-komponen ini juga dimanfaatkan oleh pihak- pihak yang selama ini memang berupaya memecah belah keutuhan bangsa (Fuad Hasyim, 2021). Situasi media sosial saat ini cenderung dipenuhi dengan hoax yang bertebaran. Hoax berpotensi menjadi salah satu pemicu terjadinya disintegrasi bangsa. Adapun jenis hoax yang sering diterima masyarakat antara lain isu sosial politik, SARA, pemerintahan, kesehatan, makanan



minuman dan keuangan (Isnu, 2021).

Penggunaan bahasa atau ekspresi emosi moral yang berpotensi menciptakan viral di media sosial telah berkembang secara positif maupun negatif. Akun media sosial individu maupun lembaga sebagian telah mengekspresikan demi menanggung keuntungan dari viralitas. Namun demikian, upaya menggunakan ekspresi atau bahasa moral dan emosional harus tetap berada di dalam rel yang positif (Fuad Hasyim, 2021).

Pada sisi lain, kehadiran kelompok-kelompok yang dianggap sebagian orang sebagai pendengung “pro-pemerintah” juga tidak kalah aktif meramaikan medan laga media sosial. Bagi masing-masing pihak, apapun opini, berita, ataupun sikap yang ditunjukkan oleh pihak yang kontra tidak akan dapat mereka percayai. Ketika primordialisme kelompok ini telah mengkrystal, pada akhirnya mereka akan mencari dan menerima informasi hanya untuk membenarkan sikap dan pendapat diri sendiri. Oleh karena itu, di era post-truth, upaya membangun personifikasi yang kredibel menjadi penting dalam upaya menyebarkan nilai-nilai wawasan kebangsaan (Fuad Hasyim, 2021).

Peran media social dalam peningkatan wawasan kebangsaan antara lain dapat diipergunakan untuk melakukan pelatihan literasi media sosial bagi generasi milenial, dapat digunakan untuk simulasi identifikasi konten hoax sekaligus cara memerangnya, dapat digunakan

sebagai simulasi konten sekaligus ceramah terkait wawasan kebangsaan dan pemahaman terkait urgensinya media social dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.wawasan kebangsaan (Efendi, 2021).

Menurut Gunawan (2021) dalam forum FGD di Lemhannas RI melaporkan bahwa peluang optimalisasi pemanfaatan media social diantaranya: 1) Media social merupakan saluran paling potensial dalam mengembangkan wawasan kebangsaan karena sifatnya yang tanpa batas (borderless), interkatif dan multimedia; 2) Merupakan media demokratis dan memiliki kebebasan untuk berekspresi (New public sphere); 3) Pada saat jaringan internet sudah 5G, artinya kecepatan aksesnya jauh lebih cepat dalam rangka memproduksi konten-konten yang sifatnya menumbuhkembangkan kembali semangat cinta tanah air; 4) Fasilitas jaringan 5G memsupport pembentukan komunitas-komunitas kalangan generasi muda yang cinta NKRI serta bilamana perlu guna menyusun kontranarasi atau apapun bentuknya sebagai penentang pengaruh negatif yang berasal dari luar maupun dalam negeri; 5) Generasi Y dan Z adalah generasi yang terbuka dalam menyikapi perbedaan-perbedaan, mereka cenderung menerima ideologi, namun mereka tetap kritis dan berani menyatakan pendapat bahkan kritik secara terbuka pada media sosial; dan 6) oleh karena berdasarkan data dari Hootsuite Januari 2021 pengguna sosial media di



Indonesia didominasi oleh Gen Z (18-24 tahun) 30,7 % dan Milenial (25-34 tahun) 34,1 % sehingga menjadi peluang yang harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah guna mengatasi permasalahan menurunnya wawasan kebangsaan.

Dengan demikian peluang dalam mengoptimalkan pengembangan Wawasan Kebangsaan di Indonesia dalam proses sosialisasi Wawasan Kebangsaan saat ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Penilaian terhadap terjadinya degradasi implementasi nilai-nilai Wawasan Kebangsaan.
- b. Penegakan hukum yang dinilai masih kurang optimal.
- c. Melunturnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa dengan masih ditandai berbagai interaksi komunikasi di media sosial yang berpotensi menimbulkan perpecahan.
- d. Pesatnya perkembangan IT yang disikapi tidak dengan bijak sehingga dunia maya dipenuhi dengan konten-konten tidak produktif.
- e. Besarnya jumlah pengguna media sosial di Indonesia berpotensi dijadikan alat sosialisasi Wawasan Kebangsaan secara efektif dan efisien.

Sedangkan berbagai tantangannya antara lain: 1) Beragam bentuk konten negatif dapat memicu terjadinya konflik baik vertikal maupun horizontal; 2) Masih maraknya konten berpotensi

mengancam yang berasal dari kejahatan siber di ruang digital seperti hoaks, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual anak, perundungan siber, ujaran kebencian, hingga radikalisme berbasis digital; 3) Terjadi kecenderungan menurunnya kepedulian terhadap prinsip-prinsip fairness dalam dunia wartawan/jurnalisme (check and recheck, cover both side, dan konfirmasi); 4) Media sosial cenderung dimanfaatkan menjadi instrumen pemuasan individual dari sisi politik dan ekonomi dan merubah bentuk pertarungan bersifat fisik bergeser ke pertarungan wacana; 5) Belum banyak peran pejabat public menjadi leading sector guna mengoptimalkan pemanfaatan media sosial oleh karena keterbatasan anggaran dan sarana prasarana di beberapa daerah akibat kondisi geografis terutama di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal yang belum tersentuh akses internet; 6) Masih lemahnya pengawasan dari pihak terkait dalam memonitor konten-konten berbau SARA walaupun sudah dibentuk tim siber. Semua komponen bangsa harus proaktif; 7) Kemampuan generasi muda yang begitu maju dalam mengikuti kemajuan teknologi, tidak diimbangi dan disertai dengan pengetahuan yang mumpuni terkait nilai-nilai wawasan kebangsaan terutama Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI (Anjar Gunadi, 2021); dan 8) Sepenuhnya mengendalikan media social hampir tidak mungkin (karena alasan-alasan politik,



ekonomi, maupun social selain karena lemahnya kemampuan nasional untuk membuat media alternative).

Dengan demikian dapat disimpulkan tantangan atau kendala dalam pelaksanaan optimalisasi Wawasan Kebangsaan melalui media sosial antara lain:

- a. Pencapaian tataran “Cakap digital” masyarakat Indonesia antara daerah satu dengan yang lain belum merata terutama pada daerah-daerah terluar, tertinggal dan terbelakang.
- b. Sarana prasarana jaringan komunikasi serta peralatan lain pada saat ini belum sepenuhnya merata dan termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.
- c. Pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi informasi di berbagai daerah perlu dibarengi dengan metode pemeliharaan, pemanfaatan dengan baik agar terjaga fungsi keberlanjutannya.
- d. Masih sering terjadi konten-konten informasi yang bernada provokatif dan unproduktif sehingga berpengaruh terhadap kesalahan persepsi dan potensi menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat.
- e. Masih adanya pihak-pihak tertentu yang sering memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok atas berita-berita hoaks sehingga terjadi

kekeruhan dan kegaduhan di kalangan elit maupun akar rumput.

Dibalik berbagai kendala, tantangan dan kelemahan yang masih ada, pemanfaatan teknologi informasi ini, secara umum memberikan dampak positif, antara lain:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Hal ini sesuai dengan Undang Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Edukasi (ITE) pada Pasal 4. Undang Undang ITE terbaru 2019.

Model konten sosialisasi nilai-nilai wawasan kebangsaan dengan menggunakan media sosial

Mendesain Platform Media social dengan konten wawasan kebangsaan sebagai pedoman

yang dijadikan acuan oleh semua penyelenggara negara dan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta berbasis etnometodologi untuk menjamin kebebasan berpendapat, menyampaikan informasi dan mengetahui kebenaran. Adanya control, kritik dan pendapat yang menjadi diskursus sehari-hari. Kebebasan publikasi diperlukan untuk memunculkan pemerintahan dan masyarakat yang cerdas serta bijaksana. Kondisi tersebut diharapkan akan memperkuat peran media sebagai “watchdog” terhadap intitusi kekuasaan dan masyarakat untuk mendorong perubahan masyarakat secara terus menerus.

Mengintegrasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan kedalam kurikulum pendidikan dg daring baik formal maupun nonformal untuk memperkuat jati diri bangsa guna membendung masuknya nilai-nilai individualisme dan liberalisme pada era revolusi industry 4.0. yang masuk melalui diversity of information available to public, keragaman informasi yang disediakan untuk khalayak yang berbeda, baik karena perbedaan kategori sosial, berdasarkan perbedaan demografis, psikografis, teknografis maupun geografis.

Terwujudnya *quality of information and culture available to public*. Tuntutan agar media social menyajikan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan kualitasnya yang mengacu kepada kebenaran yang bersifat objektif,

maksudnya terdapat akurasi, jujur, cukup lengkap, sesuai realitas, teruji, dan memisahkan fakta dengan opini. Informasi yang disajikan juga harus bersifat tidak memihak (impartial), melaporkan dengan lebih dari satu perspektif, dengan cara yang tidak sensasional dan bias.



Gambar 1. Analisis Actor dalam Optimalisasi Peran Media Sosial Guna Mengembangkan Wawasan Kebangsaan (Wasbang)

Merujuk pada Gambar 1 model optimalisasi peran media social dalam pengembangan wawasan kebangsaan dapat melibatkan 6 faktor pemangku kepentingan yang dikenal sebagai Pentahelix sistem. Keenam actor tersebut adalah pemerintah sendiri, akademisi atau pakar-pakar, para pelaku bisnis/usaha dan masyarakat dengan satu obyek media social itu sendiri.

Pemerintah memegang peranan penting dalam membuat kebijakan atau regulasi yang akan menjadi pedoman dan panduan masyarakat dalam menggunakan media social dalam aktifitas

kesehariannya. Pemerintah perlu cermat dan bijak mempertimbangkan factor kebutuhan yang

kemanfaatannya mampu menyentuh masyarakat. Namun hal ini memerlukan support penting dari komponen bangsa yang lain.



Gambar 2. Model optimalisasi peran media sosial dalam pengembangan wawasan kebangsaan

Gambar 2 merupakan model optimalisasi peran media sosial dalam pengembangan wawasan kebangsaan. Model ini dibagi dalam tiga fase yakni fase kerja komunikasi, fase aktifitas dan target. Pada fase kerja komunikasi pada awalnya komunikasi berbasis riset dan pemetaan. Hal ini menjadi dasar sebuah perencanaan komunikasi yang saling mensupport satu sama lain untuk PCR data, membangun jejaring komunitas virtual dan produksi serta diseminasi narasi. Kemudian pada level aktifitas terdiri dari personal direction, Triple-C dan media recognition memiliki target

untuk mencapai kualifikasi Good Communication Performance (Kinerja komunikasi efektif), pemahaman dan dukungan public, pembangunan kepercayaan (trust building) dan opini public positif (positif public opinion). Keseluruhan target, aktifitas maupun fase kerja komunikasi diharapkan meningkatkan implementasi dari nilai-nilai yang ada dalam wawasan kebangsaan.

Strategi implementasi model pengembangan wawasan kebangsaan dalam rangka memperkuat ketahanan nasional di Indonesia



Berangkat dari sektor pendidikan terutama lingkungan sekolah, sejak tahun 2019, 43.5% dari 270 juta orang di Indonesia memiliki akses ke internet. Peningkatan terbesar terjadi di daerah perkotaan, di mana jumlah pengguna meningkat sebanyak 53%, namun daerah pedesaan juga mengalami peningkatan yang stabil, yaitu sebesar 31%. Dalam empat tahun terakhir, persentase siswa berusia 5–24 tahun di Indonesia yang memiliki akses internet meningkat tajam dari 33,98% menjadi 59,3%. Lebih dari seperempat pengguna internet (25.5%) adalah anak-anak dan remaja. Anak-anak dan remaja tersebut menghabiskan waktu waktu untuk berinternet mendekati 5 jam per harinya (Handphone, Laptop, Komputer) (Dirjen Dikpaud Dikdas dan Dikmen, 2021).

Sasaran berbasis kelas diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelatihan literasi digital yang diikuti kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan; meningkatkan intensitas penerapan dan pemanfaatan literasi digital dalam kegiatan pembelajaran; dan meningkatkan pemahaman kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa dalam menggunakan media digital dan internet. Sedangkan sasaran berbasis sekolah antara lain 1) meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang diikuti kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan; 2) Meningkatnya intensitas penerapan dan pemanfaatan literasi digital dalam kegiatan pembelajaran; 3)

Meningkatnya pemahaman kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa dalam menggunakan media digital dan internet. Sasaran berbasis masyarakat meliputi dua sasaran peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang mendukung literasi digital di sekolah; peningkatan tingkat keterlibatan orang tua, komunitas, dan lembaga dalam pengembangan literasi digital (Dirjen Dikpaud Dikdas dan Dikmen, 2021).

Menurut Dirjen Dikpaud Dikdas dan Dikmen (2021) literasi digital sekolah harus dikembangkan sebagai mekanisme pembelajaran terintegrasi dalam kurikulum atau setidaknya terkoneksi dengan sistem belajar mengajar. Strategi peningkatan literasi digital di sekolah meliputi 1) Penguatan Kapasitas Fasilitator; 2) Peningkatan Jumlah dan Ragam Sumber Belajar Bermutu; 4) Perluasan Akses Sumber Belajar Bermutu dan Cakupan Peserta Belajar; 5) Peningkatan pelibatan public, dan 6) penguatan tata Kelola.

Dalam rangka meningkatkan peran media social dalam pengembangan wawasan kebangsaan Pratama HS (2021) menyimpulkan bahwa Media sosial memiliki keunggulan karena kemudahan akses, jangkauan global, dan kecepatan arus informasi multimedia. Pemikiran agak berbeda disampaikan oleh Kartikawangi (2021) yang merekomendasikan bahwa dalam mengembangkan wawasan kebangsaan diperlukan penguatan dan upaya agar masyarakat yang aktif membicarakan wawasan kebangsaan



dengan bahasa dan budaya mereka, khususnya isu-isu aktual di media social.

Salah satu dalam upaya merumuskan strategi implementasi model pengembangan wawasan kebangsaan dalam rangka memperkuat ketahanan nasional di Indonesia, dilakukan dengan menemukan, mengevaluasi dan menganalisis elemen-elemen kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang kemudian di rumuskannya menjadi sebuah rancangan strategi. Elemen-elemen berdasarkan berbagai pendapat pakar selama pelaksanaan FGD maupun RTD diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Faktor kekuatan

- 1) Usia produktif (15 – 65 tahun) pada tahun 2020 – 2030 mencapai 70% (180 juta orang pada tahun 2020).
- 2) Generasi Y dan Z menguasai teknologi sehingga teknologi informasi dapat berkembang dengan cepat
- 3) Media social adalah media interaktif yang memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik sehingga pengguna dapat berpartisipasi dan memodifikasi isi dari informasi pada saat itu juga (real time).

b. Faktor kelemahan/kendala

- 1) Meningkatnya penggunaan media sosial di masyarakat, tidak diikuti dengan peningkatan sumber daya

manusia padahal media sosial memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan dengan media konservatif, karena siapa saja menjadi pemilik media, jurnalis atau penulis yang dapat membagikan apa saja yang diinginkan.

- 2) Media sosial tidak peduli terhadap prinsip-prinsip fairness dalam dunia pewartaan/jurnalisme (check and recheck, cover both side, dan konfirmasi).
- 3) Media sosial menjadi instrumen pemuasan individual dari sisi politik dan ekonomi

c. Faktor peluang

- 1) Sifat reaktif warganet Indonesia yang mudah disulut isu nasionalisme, terutama bila “diserang” oleh pihak-pihak di luar Indonesia, bisa dimanfaatkan. Di tengah polemik yang viral, konten-konten tentang wawasan kebangsaan, dapat dimasukan dengan muatan-muatan yang ringan.
- 2) Media Sosial sebagai demokratisasi kanal informasi, dengan teknologi digital memungkinkan produksin dan saling berbagi konten oleh siapa pun. Aspek khusus ini, menurut literatur, memiliki potensi untuk meningkatkan

partisipasi demokratis dengan memfasilitasi dialog baik antara pemerintah dan warga negara.

- 3) Masyarakat dapat mengakses berbagai sumber informasi dengan cepat tanpa batas.

d. **Faktor Tantangan**

- 1) Beragam bentuk konten negatif berpotensi memicu konflik sosial.
- 2) Masyarakat tidak mengutamakan informasi dari otoritas produksi, namun mengandalkan jejaring berdasarkan kenyamanannya.
- 3) Adanya ancaman kejahatan siber di ruang digital seperti hoaks, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual anak, perundungan siber, ujaran kebencian, hingga radikalisme atau terorisme berbasis digital.
- 4) Misinformation: informasi informasi yang mungkin mengandung sedikit kebenaran tetapi telah dimodifikasi atau dilebih-lebihkan
- 5) Echo chamber: sebuah lingkungan dimana opini, kecenderungan politik, atau keyakinan pengguna tentang suatu topik diperkuat karena interaksi berulang dengan rekan atau sumber yang memiliki kecenderungan dan sikap serupa. Bahayanya adalah Polarisasi dan Ketidakpercayaan

- 6) Percakapan tentang Pancasila didominasi oleh nuansa politis, antara yang pro dan kontra pemerintah. Kritik dari kalangan kontra pemerintah menyangkut Pancasila biasanya dihubungkan dengan ketidakadilan yang muncul dalam isu-isu besar yang sedang hangat.

- 7) Narasi terpopuler didominasi oleh aktor yang cenderung kontra atau kritis kepada pemerintah, dan lebih natural (tidak banyak mengangkat tagar) sedangkan narasi dari pemerintah, cenderung dilakukan oleh aktor dari kalangan buzzer, terlihat dari masif dan terorganisasikannya tagar terkait Pancasila, khususnya saat ada kampanye atau sosialisasi narasi tertentu.

- 8) Secara demografi, generasi X (tua) cukup aktif membahas topik Pancasila, demikian juga dengan gen Y & Z. Akibatnya, kritik gen X terkait Pancasila bisa terdifusi ke kalangan gen Y & Z.

- 9) Terdapat dua cluster netizen pro-kontra di Twitter yang kadang sama besar, dan sering cluster kontra lebih besar untuk narasi berupa



kritik. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia, karena percakapan tentang Pancasila bukannya menyatukan bangsa, tapi membangun dan memperlebar polarisasi.

e. **Strategi**

Beberapa pendapat para pakar dalam pelaksanaan FGD maupun RTD dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Diperlukan optimalisasi kebijakan penggunaan media sosial diperuntukan guna menanamkan konsepsi kenegaraan berdasarkan nilai-nilai yang bersumber dari konsensus dasar bangsa dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
- 2) Penguatan literasi media sosial bagi generasi milenial dinilai relevan dan tepat. Perlu melakukan penguatan konten, isi, dan pesan-pesannya dengan cara kreatif dan menarik serta sesuai dengan konteks kekinian dan tidak terkesan militeristik.
- 3) Mengadakan lomba atau kompetisi yang sifatnya wawasan kebangsaan untuk dimasukkan dalam media sosial. Bukan hanya bentuk cerita,

tapi kegiatannya bisa divisualkan dengan audio visual dan disebarakan melalui Youtube, Instagram, Facebook atau media sosial lain

- 4) Kerjasama antar lembaga dan memanfaatkan segenap prajurit serta aparat pemerintahan untuk aktif mengembangkan wawasan kebangsaan melalui tatap muka terbatas dengan masyarakat maupun melalui media social.

Selain hal tersebut perlu dapat dilakukan antara lain adalah:

- 1) Memberikan tanggapan atas komentar maupun pertanyaan masyarakat terkait wawasan kebangsaan sesuai norma dalam rangka ketahanan wilayah
- 2) Melakukan soft campaign menggunakan akun-akun media sosial resmi kementerian/lembaga terkait.
- 3) Memilih admin akun media sosial resmi kementerian/lembaga dari kalangan milenial atau seseorang yang memahami generasi milenial.
- 4) Menggandeng figur publik yang memiliki rekam jejak yang baik dan banyak pengikut untuk berperan serta dalam upaya penanaman dan pengembangan wawasan



- kebangsaan.
- 5) Apresiasi dan reward/penghargaan pada konten creator dengan menerbitkan kategori/peringkat bagi para konten creator serta membina dan mendampingi para konten kreator yang kurang berwawasan kebangsaan atau kurang nasionalis.
 - 6) Tahapan Strategi optimalisasi media social:
 - a) Tahapan transformasi pengetahuan wawasan kebangsaan
 - (1) Berupaya untuk menumbuhkan ketertarikan
 - (2) Memberikan pengetahuan sejelas mungkin
 - (3) Menempatkan pola pikir peserta sejalan dengan proses yang dilaksanakan
 - (4) Memberikan stimulasi ingatan dengan memberikan contoh yang berkaitan dengan materi yang disampaikan.
 - (5) Berinteraksi dalam situasi belajar yang berbeda dengan materi yang sama agar ingatan dapat bertahan.
 - (6) Berupaya untuk bersikap menghormati sesuai dengan tingkat usia, kemampuan dan perbedaan pandangan
 - b) Tahapan pemahaman wawasan kebangsaan
 - (1) Menggunakan pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*), di mana diupayakan untuk diperkenalkan mengenai perilaku-perilaku keteladanan
 - (2) Menggunakan pendekatan moral kognitif (*cognitive moral development*), berupaya mengarahkan agar mampu mengambil sikap dalam menentukan nilai apa yang dipilih
 - (3) Menggunakan pendekatan analisis nilai (*value analysis approach*), melatih mengolah kemampuan berpikir logis, rasional dan ilmiah mengenai nilai
 - (4) Menggunakan pendekatan klarifikasi nilai (*values clarification approach*), berupaya
- (7) Berupaya untuk selalu mengkompromikan bahan materi atau strategi apa yang digunakan dalam proses
 - (8) Selalu mengevaluasi dan mendiagnosis kesalahan dalam proses secara terus-menerus.



menumbuhkan kesadaran dalam mengidentifikasi nilai yang akan diimplementasikan dalam sikap dan perilaku

- c) Tahapan implementasi wawasan kebangsaan
- (1) Memperkuat konsep atas kebiasaan baru yang bersesuaian
 - (2) Mengatur situasi yang menyenangkan
 - (3) Diupayakan sebagai dorongan yang datang dari diri sendiri
 - (4) Melakukan semua latihan atau simulasi setiap ada kesempatan dan sesempurna mungkin.

Sedangkan strategi optimalisasi media sosial untuk wawasan kebangsaan menurut DroneEmprit

a. Narasi:

Narasi dari pemerintah masih fokus pada tujuan dari sisi pemerintah (misal dukungan thd BPIP), belum dari sisi publik khususnya gen Y&Z.

- a) Akibatnya aspek “*What is it for me*” bagi publik belum terasa.
- b) Agar wawasan kebangsaan sampai dan diterima oleh publik (khususnya gen Y&Z), perlu narasi yang fokus pada perhatian mereka; misal: bagaimana sebagai anak bangsa bersama pemerintah menciptakan

kehidupan yang harmonis, keadilan, kesetaraan, kesejahteraan, dan isu universal (misal climate change).

b. Aktor:

- 1) Penggunaan buzzer dan bot untuk mengangkat narasi dengan rangkaian tagar-tagar agar trending di media sosial terbukti hanya bergema di dalam sub-cluster mereka saja; narasi tidak terdifusi ke target publik. Cara ini tidak akan efektif untuk membangun wawasan kebangsaan, malah sebaliknya sering menimbulkan polarisasi.
- 2) Hindari penggunaan buzzer dan bot, dan buat program yang langsung melibatkan gen Y&Z yang mengajak mereka untuk berpikir, mengusulkan, dan bersama pemerintah mewujudkan gagasan dalam Pancasila secara aktual.
- 3) Upayakan agar gen Y dan Z itu sendiri yang aktif membicarakan wawasan kebangsaan mereka melalui isu-isu aktual di media sosial (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok).

Rekomendasi Binda Kepri dalam upaya memperkuat wawasan kebangsaan di era digital

- a. Mengoptimalkan giat intelijen siber dalam memfilter paham-paham yang tersebar di

dunia digital agar tidak berkembang lebih pesat lagi, serta menimbulkan kejahatan-kejahatan digital yang dapat mempengaruhi keamanan dan keutuhan NKRI.

- b. Mendorong pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih humanis terkait dengan penggunaan dunia digital agar mampu mengakomodir setiap permasalahan dalam menunjang penggunaan teknologi digital selain UU ITE.
- c. Membuat konten-konten yang bernilai tentang pendidikan wawasan kebangsaan seperti tentang Pancasila, kepahlawanan yang memperjuangkan Indonesia dll, untuk disebar luaskan melalui berbagai media sosial seperti facebook, twitter, instagram, whatsapp, youtube, telegram, dll.
- d. Mengoptimalkan adanya literasi digital guna menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan di tengah pesatnya pengguna internet dan smart phone
- e. Melakukan propaganda baik positif maupun negative, propaganda putih (konten mendukung kesuksesan program pemerintah) dan propaganda hitam (konten counter narasi terhadap kelompok oposisi)

Dengan memperhatikan fenomena yang berkembang di masyarakat dan berbagai referensi di atas, maka optimalisasi peran media sosial guna mengembangkan Wawasan Kebangsaan, dapat

dilakukan dengan strategi:

- a. Meningkatkan frekuensi program sosialisasi nilai-nilai Wawasan Kebangsaan melalui media yang paling diminati generasi muda dan masyarakat luas dengan konten yang menarik, edukatif dan produktif.
- b. Memperbanyak kegiatan perlombaan yang mendorong kreatifitas generasi muda bertema Wawasan Kebangsaan.
- c. Mendorong terciptanya peraturan-peraturan yang lebih humanis terkait dengan penggunaan dunia digital agar mampu mengakomodir setiap permasalahan dalam menunjang penggunaan teknologi digital di samping Undang Undang ITE.
- d. Membuat konten-konten yang bernilai tentang pendidikan Wawasan Kebangsaan seperti tentang Pancasila, kepahlawanan yang memperjuangkan Indonesia dan lain-lain, untuk disebar luaskan melalui berbagai media sosial seperti facebook, twitter, instagram, whatsapp, youtube, telegram dan lain-lain.
- e. Mengoptimalkan gerakan literasi digital guna menumbuh kembangkan Wawasan Kebangsaan di tengah pesatnya pengguna internet dan smart phone.
- f. Mengoptimalkan kegiatan intelijen cyber dalam memfilter paham-paham yang tersebar di dunia digital agar tidak

berkembang lebih pesat lagi, serta menimbulkan kejahatan-kejahatan digital yang dapat mempengaruhi keamanan dan keutuhan NKRI.

SIMPULAN

- a. Mantapnya wawasan kebangsaan di tengah maraknya media social di lapisan masyarakat merupakan suatu keniscayaan di system politik yang demokrasi di era revolusi industry 4.0 dan society 5.0.
- b. Media sosial memiliki peran yang mampu menjabatani komunikasi dan memberikan informasi kepentingan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional, sehingga diperlukan optimalisasi kebijakan penggunaan media social diperuntukan guna menanamkan konsepsi kenegaraan berdasarkan nilai-nilai yang bersumber dari konsensus dasar bangsa dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
- c. Peningkatan peran media sosial perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan merupakan prioritas pembangunan nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama segenap komponen bangsa dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan ketahanan nasional.
- d. Model peningkatan peran media social dalam pengembangan wawasan

- kebangsaan dapat mengoptimalkan pentahelix system
- e. Strategi penguatan media social dalam rangka mengembangkan wawasan kebangsaan dapat dirumuskan melalui tahapan transformasi pengetahuan wawasan kebangsaan, tahapan pemahaman wawasan kebangsaan dan tahapan implementasi wawasan kebangsaan. Poin-poin strategi tersebut antara lain:
 - 1) Optimalisasi penggunaan media social yang bertanggungjawab perlu terus dikembangkan dengan mensosialisasi konten-konten bernuansa wawasan kebangsaan.
 - 2) Mengoptimalkan giat intelijen siber dalam memfilter paham-paham yang tersebar di dunia digital agar tidak berkembang lebih pesat lagi, serta menimbulkan kejahatan-kejahatan digital yang dapat mempengaruhi keamanan dan keutuhan NKRI.
 - 3) Mendorong pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih humanis terkait dengan penggunaan dunia digital agar mampu mengakomodir setiap permasalahan dalam menunjang penggunaan teknologi digital selain UU ITE.
 - 4) Membuat konten-konten yang bernilai tentang pendidikan wawasan



kebangsaan seperti tentang Pancasila, kepahlawanan yang memperjuangkan Indonesia dll, untuk disebar luaskan melalui berbagai media sosial seperti facebook, twitter, instagram, whatsapp, youtube, telegram dan lain-lain.

- 5) Mengoptimalkan adanya literasi digital guna menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan di tengah pesatnya pengguna internet dan smart phone.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2011. Laporan hasil survei pandangan masyarakat terhadap kehidupan bernegara. Jakarta.
- Bahri H. S., Sapriya, & Halimi M. 2018. Penguatan wawasan kebangsaan generasi muda melalui kegiatan tadarus buku. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 15 No. 2* hal 126 – 133.
- Banks, J. A. 2008. Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Research, 37(3)*, 129–139.
- Barida, M. 2017. Inklusivitas vs eksklusivitas: Pentingnya pengembangan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan kedamaian yang hakiki bagi masyarakat Indonesia. In *THE 5th URECOL PROCEEDING* (hal. 1403–1409).
- Benavot, A. 2015. Literacy in the 21st century: towards a dynamic nexus of social relations. *International Review of Education, 61(3)*, 273–294.
<https://doi.org/10.1007/s11159-015-9463-3>
- Bintang, I. 2021. Optimalisasi Peran Media Sosial Guna Mengembangkan Wawasan Kebangsaan. Disampaikan dalam RTD Lemhannas RI tanggal 1 September 2021.
- Blackshaw, T. 2010. *Key concept in community studies*. London: Sage Publication.
- Cawidu, I. 2016. *Pemanfaatan media sosial. Materi presentasi disampaikan dalam acara Rapat Kerja Pustakawan XX Ikatan Pustakawan Indonesia*. Bandung, Indonesia.
- Dirjen Dikpaud Dikdas dan Dikmen. 2021. Tantangan Dan Strategi Gerakan Literasi Digital Di Sekolah. Disampaikan dalam RTD Lemhannas RI 1 September 2021.
- Efendi, M. 2021. Optimalisasi Peran Media Sosial Guna Mengembangkan Wawasan Kebangsaan. Disampaikan dalam RTD Lemhannas RI tanggal 1 September 2021.
- Gunadi, A. 2021. Optimalisasi Peran Media Sosial Guna Mengembangkan Wawasan



Kebangsaan. Disampaikan dalam RTD Lemhannas RI tanggal 1 September 2021. Disampaikan dalam RTD Lemhannas RI tanggal 1 September 2021.

Gunawan, G. G. 2021. Optimalisasi Peran Media Sosial Guna Mengembangkan Wawasan Kebangsaan.

Hasyim, F. 2021. Optimalisasi Peran Media Sosial Guna Mengembangkan Wawasan Kebangsaan. Disampaikan dalam RTD Lemhannas RI tanggal 1 September 2021.

Isnu, D. 2021. Optimalisasi Peran Media Sosial Guna Mengembangkan Wawasan Kebangsaan. Disampaikan dalam RTD Lemhannas RI tanggal 1 September 2021.

Jucan M., Jucan C., & Rotariu I. 2013. The social destination: How social media influences the organisational structure and leadership of DMOS. *World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering*, 7(6), 1672-1678.

Kaplan A. M., & Haenlein M. 2010. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59- 68.

McFarland L. A., & Ployhart R. E. 2015. Social media: A contextual framework to guide

research and practice. *Journal of Applied Psychology*, 100(6), 1653–1677

Partnership for 21st Century Skills. 2014. Reimagining citizenship for the 21st century: a call to action for policymakers and educators. Diambil dari http://www.p21.org/storage/documents/Reimagining_Citizenship_for_21st_Century_webversion.pdf

Power D. J. & Phillips-Wren G. 2011. Impact of social media and web 2.0 on decision-making. *Journal of Decision Systems*, 20(3), 249-261.

Pratama, H. S. 2021. Media Sosial dan Wawasan Kebangsaan: Strategi Naratif. Disampaikan dalam RTD di Lemhannas RI 1 September 2021.

Rustiana. 2018. Persepsi Digital Dependent terhadap Pemanfaatan Media Sosial dan Dampak Sosial Ekonominya. *Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 15, Nomor 1, hal 17-32*

Siddiqui S., & Singh T. 2016. Social media its impact with positive and negative aspects. *International Journal of Computer Applications Technology and Research*, 5(2), 71-75.

Suryadi, K. 2010. Inovasi nilai dan fungsi komunikasi partai politik bagi penguatan civic literacy. Pidato Pengukuhan Jabatan



Guru Besat Ilmu Komunikasi Politik.
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

Turban E., King D., Lee J. K., Liang T. P., & Turban,
D. C. 2015. *Electronic Commerce: A
Managerial and Social Networks
Perspective (8th ed)*. Switzerland: Springer
International Publishing.

Wibisono, G. 2017. Media Baru dan Nasionalisme
Anak Muda: Pengaruh Penggunaan Media
Sosial 'Good News From Indonesia'
terhadap Perilaku Nasionalisme. *Jurnal
Studi Pemuda Vol. 6 No. 2*